

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bangladesh sebagai salah satu negara produsen garmen terbesar di dunia tidak luput dari andil masif jutaan buruh fast fashion yang mendorong roda perekonomian negara tersebut. Komitmen regulasi ketenagakerjaan dan janji perlindungan hak buruh yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh maupun asosiasi pengusaha (BGMEA), pada kenyataannya tidak bergerak secara semestinya di lapangan. Terutama pada periode pasca-COVID-19 (2022–2025), masih banyak hambatan, eksploitasi, hingga represi hukum ekstrem yang dilalui buruh garmen saat menuntut hak-hak dasarnya. Hal ini mencerminkan hilangnya esensi perlindungan hukum dan hak asasi buruh di tingkat tapak. Non-State Actor lokal telah berusaha untuk mengadvokasikan isu ini melalui interaksi domestik dengan otoritas Bangladesh, namun pada kenyataannya pemerintah kurang mendengarkan aspirasi tersebut dan justru meresponsnya dengan kriminalisasi. Akibat tersumbatnya jalur domestik ini, aktor akar rumput beralih arah untuk melakukan advokasi isu ke komunitas internasional melalui pola bumerang (*boomerang pattern*), dan salah satu Non-State Actor transnasional utama yang menggerakkan pola tersebut adalah Clean Clothes Campaign (CCC).

Penelitian ini juga menemukan adanya transformasi strategi advokasi CCC pada periode pasca-COVID-19. Jika pada periode sebelumnya CCC lebih banyak mengandalkan kampanye kesadaran publik dan tekanan reputasional, maka pada periode 2022–2025 organisasi ini bergerak menuju advokasi yang lebih berbasis bukti, berorientasi pada perubahan struktural, dan memanfaatkan instrumen hukum yang mengikat. Pergeseran tersebut terlihat dari penggunaan berbagai *tracker* dan laporan berbasis data, penguatan narasi *wage theft*, dukungan terhadap regulasi human rights due diligence, serta dorongan terhadap mekanisme akuntabilitas yang memiliki konsekuensi hukum bagi perusahaan multinasional.

Melalui penelitian ini, Clean Clothes Campaign (CCC) terbukti telah memenuhi dan mengoperasikan empat pilar dari konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dalam mengadvokasikan isu serta membangun tekanan terkait perlindungan hak buruh di Bangladesh pasca-pandemi. Melalui teori Transnational

Advocacy Network (TAN), strategi jaringan ini dianalisis secara terintegrasi ke dalam empat pilar yakni Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Hasilnya menunjukkan bahwa CCC berperan aktif dalam menghimpun data transparansi radikal rantai pasok global berbasis bukti empiris, membangun simbol perjuangan moral lewat pemingkasan kasus sebagai kejahatan "pencurian upah", menjalin tekanan internasional yang memaksa dengan memanfaatkan regulasi CSDDD Uni Eropa, serta menagih komitmen hukum yang mengikat melalui International Accord. Sinergi keempat pilar TAN yang dijalankan oleh CCC ini pada akhirnya secara nyata terbukti mampu menembus batasan domestik hingga berhasil memaksa pencabutan gugatan pidana massal terhadap buruh di Bangladesh pada Oktober 2025.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah saran kontributif baik secara akademis maupun praktis. Secara teoretis, peneliti Hubungan Internasional selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis teori TAN dengan mengintegrasikannya pada pendekatan ekonomi politik global, khususnya dalam mengkaji evolusi jaringan transnasional yang kini mulai memanfaatkan instrumen hukum pasar global ketimbang sekadar tekanan reputasi konvensional, serta memperluas studi komparatif pada negara produsen garmen lain yang memiliki karakteristik represi domestik berbeda. Sementara itu secara praktis, jaringan advokasi transnasional seperti CCC beserta mitra lokal diimbau untuk segera menyusun strategi mitigasi terhadap risiko pemutusan hubungan kontrak sepihak oleh merek retail global dengan cara memperkuat kapasitas kemandirian serikat pekerja akar rumput, sedangkan bagi pemerintah Bangladesh beserta asosiasi pengusaha (BGMEA) disarankan untuk proaktif mereformasi regulasi upah layak dan menghentikan taktik kriminalisasi terhadap buruh demi menjaga stabilitas serta posisi tawar ekonomi mereka dalam rantai pasok internasional.